

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 . Pendahuluan

Kualitas laporan keuangan akan terpenuhi jika informasi dalam laporan keuangan tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, dapat dikatakan andal juga jika informasi dalam laporan keuangan tersebut menyajikan setiap fakta secara jujur serta dapat diverifikasi. Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan bisa saja relevan, tetapi jika dalam penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut bisa saja tidak akan mempercayai informasi yang disajikan tersebut. Beberapa hal seperti inilah yang akhirnya menyebabkan kualitas dari laporan keuangan menjadi sangat penting karena merupakan syarat karakteristik dari pelaporan keuangan agar dapat dikatakan memenuhi kualitas akan dapat dipercaya oleh penggunanya dalam kaitannya dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.(Peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010).

Kurangnya kualitas laporan keuangan sering menjadi permasalahan dalam suatu instansi tertentu termasuk pada pemerintah daerah di Indonesia yaitu pada SKPD masing-masing daerah di Indonesia. SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) di Indonesia. SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik. Dasar hukum yang berlaku sejak tahun 2004 untuk pembentukan SKPD adalah agar dapat memenuhi karakteristik laporan keuangan tersebut

maka SKPD

harus dapat meningkatkan kualitas laporan keuangannya. Dengan meningkatnya kualitas laporan keuangan pada SKPD maka akan lebih mudah dalam menentukan keputusan yang dapat membawa pemerintahan ke arah yang lebih baik dan memberikan informasi kepada pihak yang berkepentingan yaitu Badan Pengawas Keuangan (BPK). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya akan mendapat penilaian berupa opini dari BPK. Ketika BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian terhadap laporan keuangan, artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu organisasi tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TW), dan pernyataan menolak memberi opini atau disebut juga Tidak Memberi Pendapat (TMP). (Pasal 120 UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.).

Fenomena pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Seperti berikut :

Menurut R. Rita Dewi P. Selaku Kepala Bidang Aset Daerah Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan Asli Daerah Kabupaten Bandung Barat. Pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) dimana Pemerintah Kabupaten Bandung Barat ditekankan untuk lebih memperhatikan kualitas laporan keuangan meliputi tata kelola laporan keuangan yang baik, transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan khususnya mengenai pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal itu terkait belum adanya penyelesaian kasus pengelolaan keuangan dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang terjadi setiap tahun di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. BPK RI memberikan

opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2013. Sampai saat ini masih ada masalah yang terjadi, masalah pertama yaitu ketidak cocokkan data aset yang dilimpahkan dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Ketidak cocok kan ini umumnya soal adanya dana yang tercatat ganda, atau adanya daftar aset yang tercatat, namun sebenarnya tidak ada setelah ditelusuri ke lapangan. Sehingga mengenai total keseluruhan aset yang ada di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, terutama nominalnya masih belum bisa memberikan data yang pasti, masalah kedua yaitu penyajian persediaan yang tidak memadai, masalah ke tiga yaitu penyajian penyertaan modal pemerintah yang tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). (Rully A Hadiyat ; 2013).

Pemerintah Kab. Bandung Barat kembali meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2014. Opini yang diraih Kabupaten Bandung Barat karena masih ada beberapa pekerjaan yang harus lebih ditingkatkan lagi, terutama menyangkut penatausahaan aset di beberapa SKPD yang hingga kini masih belum ada titik temunya. Menyadari masih adanya kelemahan dalam pemerintahan yang dipimpin Abubakar, Ia menegaskan akan segera melakukan konsolidasi dan memerintahkan dengan tegas seluruh jajarannya untuk menyelesaikan permasalahan yang selama ini kerap menjadi pengganjal tersebut secepat mungkin. (Galuh M Raffi ; 2014).

Hal yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah pemanfaatan sistem informasi akuntansi. Dalam pengelolaan keuangan daerah,

pemerintah daerah diharapkan dapat menyediakan informasi atas anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan informasi akuntansi yang akan digunakan manajer public dalam melakukan fungsi perencanaan dan pengendalian organisasi secara tepat waktu, relevan, akurat dan lengkap. Oleh karena itu dibutuhkan suatu teknologi sistem informasi akuntansi yang mudah diakses sehingga dapat menyediakan informasi tersebut agar informasi yang dibutuhkan tersedia tepat waktu (Andriani, 2015 : 71).

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi akuntansi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari PP No. 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah. Adanya penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan pemerintah, otomatis juga menuntut aparatur harus mengubah dalam menyelesaikan pekerjaannya dari semula manual menjadi terkomputerisasi (Hamzah :2016).

Tidak dapat disangkal bahwa sebagian besar informasi yang dibutuhkan perusahaan adalah informasi akuntansi (Haryono Jusup, 2005). Karena pada dasarnya akuntansi merupakan bahasa bisnis yang berarti sebagai suatu sistem informasi dimana secara spesifik memiliki fungsi untuk menghasilkan informasi keuangan penting mengenai aktivitas keuangan dari suatu organisasi usaha kepada berbagai pihak yang berkepentingan untuk dipakai dalam membuat pertimbangan atau keputusan bisnis lain (Chairul Marom, 2000:5).

Kegunaan akuntansi itu sendiri sangat bervariasi mulai dari sebagai alat hitung menghitung, sumber informasi dan pengambilan keputusan. Informasi akuntansi yang dihasilkan dapat digunakan untuk semua tahap manajemen mulai dari perencanaan,

pengendalian, sampai pengambilan keputusan (Hanse dan Mowen, 2009) dan informasi akuntansi tersebut di dihasilkan oleh sistem informasi akuntansi (Hall, 2004: 21).

Stair & Reynolds (2010:57) menyatakan bahwa perusahaan memerlukan suatu sistem informasi akuntansi yang berguna dan sesuai dengan kepentingan perusahaan, untuk membantu proses pengambilan keputusan. Peran mendasar dari sistem informasi akuntansi dalam organisasi adalah sebagai penampung dan pengolah data akuntansi untuk menghasilkan informasi akuntansi yang berkualitas untuk mendukung aktivitas internal perusahaan yang dilakukan oleh para manajer dan karyawan serta aktivitas perusahaan dengan pihak luar seperti dengan konsumen, pemasok pemerintah dan lain-lain (Azhar Susanto, 2013: 374).

Hasil dari sistem informasi akuntansi yang berkualitas menjadi salah satu keunggulan yang kompetitif bagi organisasi (Baltzan, 2012: 14). Oleh karena itu sistem akuntansi yang berkualitas sangat dibutuhkan bagi setiap organisasi. Azhar Susanto (2013: 14) menyatakan kualitas sistem informasi akuntansi adalah integrasi semua unsur dan subunsur yang terkait dalam membentuk sistem informasi akuntansi untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Unsur-unsur yang terintegrasi tersebut disebut juga sebagai komponen sistem informasi akuntansi yang terdiri dari *Hardware*, *Software*, *Brainware*, *Prosedur*, *Database* dan Jaringan komunikasi (Azhar Susanto, 2013: 14). Senada dengan Azhar Susanto, Sacer *et al* menyatakan bahwa kualitas sistem informasi akuntansi adanya integrasi dari berbagai komponen sistem informasi akuntansi yaitu *hardware*, *software*, *brainware*, *telecommunication network*, dan *data base* yang berkualitas, serta *quality of work dan satisfaction of users* (Sacer *et al*, 2006: 62).

Hal terakhir yang mungkin mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah sistem pengendalian intern pemerintah itu sendiri. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai keandalan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang mana akan menghasilkan laporan keuangan yang mempunyai nilai informasi. Sistem pengendalian internal yang efektif mengacu pada langkah-langkah pengendalian yang efektif yang dibentuk oleh suatu organisasi dengan tujuan menjamin keandalan catatan baik keuangan dan non keuangan seperti kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang akan menjamin tercapainya tujuan organisasi. Dalam PP tersebut menyebutkan bahwa tujuan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya: (a) Efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara; (b) Keandalan Laporan Keuangan; (c) Pengamanan aset negara; dan (d) Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Badara, 2016 : 18).

Penelitian yang dilakukan oleh As Syifa Nurillah (2014) yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Kota Depok).” Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah memiliki efek positif yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan fenomena diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “ **Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Desa di wilayah Kabupaten Bandung Barat**”

1.2 . Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa identifikasi masalah yang diuraikan sebagai berikut:

1. Pemerintah kabupaten dalam pengelolaan aset banyak yang tidak transparan dan akuntabel.
2. Masih banyak pemkab yang belum bisa memanfaatkan sistem informasi akuntansi untuk menyediakan informasi tersebut agar informasi yang dibutuhkan tersedia tepat waktu.
3. Sistem pengendalian internal yang belum efektif menyebabkan pemkab mendapatkan kendala dalam kualitas laporan keuangan.

1.3 . Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat ?

2. Seberapa besar Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat ?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mengumpulkan data dari berbagai informasi yang terkait dengan Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Yang kemudian akan dianalisa untuk mencapai hasil yang diharapkan. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui seberapa besar pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan memperluas ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan sistem informasi akuntansi, khususnya mengenai pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Kegunaan akademis adalah untuk pengembangan keilmuan, dimana penelitian ini dapat berguna sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pengaruh sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian internal terhadap pengendalian internal
2. Sebagai sarana pengaplikasian teori sehingga dapat berguna bagi pihak akademis lain yang membutuhkan.
3. Sebagai referensi bagi peneliti yang selanjutnya yang akan meneliti dengan konsep teori yang sama.

